

FALSAFAH EMPAN PAPAN BERDIALOG DENGAN RICHARD RORTY TENTANG BATAS TOLERANSI

Agus Jemi Karyadi

Mahasiswa Pascasarjana STFT Widya Sasana Malang
Jln. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Jawa Timur, Indonesia

agusjemik2017@gmail.com

Abstract

The focus of my study is to devise tolerance limits in the Javanese *empan papan* philosophy frame. This study is important because there are many incidents of oppression between groups in Indonesia. Indonesia has a variety of diversity, such as religion, culture and ethnicity. That diversity creates boundaries in building life together in Indonesia. I used a library research method about Javanese philosophy of *empan papan* and dialogued it with Richard Rorty's thoughts. Four board is widely understood people must consider the location, condition and situation carefully. You can't just talk and act. Javanese humans place knowledge in the way they are in the expression of *ngelmu kanti laku* (knowledge by doing-being in action, and words that are realized). The philosophy of the *empan papan* was dialogue with Richard Rorty's thoughts about ironic humans, ironic liberal people and multicultural communitarian politics. This research brings together East-West tolerance limits, confirming Richard Rorty's thoughts. Limits of tolerance must be institutionalized through a consensus of public opinion that is built up dialogically. This is very possible because Javanese people are adaptive to *empan papan*. Javanese people respect the independence of each individual but at the same time place it in the public sphere. Javanese man never puts his self awareness alone, always in his existence along with other subjects.

Keywords: *empan papan*, ironically liberal, multicultural politics, tolerance limits

INTRODUKSI

Persoalan intoleransi sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa terjadi antarindividu, kelompok dengan individu dan antarkelompok dalam masyarakat. Tindakan intoleran itu bahkan berujung pada kekerasan yang memberikan luka bahkan kematian. Indonesia terdiri dari beragam agama, budaya dan suku bangsa. Perbedaan-perbedaan dalam keragaman itu tidak sedikit memunculkan sikap intoleran dari anggotanya.

Manusia Jawa, dengan kerumitan identitasnya, juga tidak jarang jatuh pada tindakan intoleran terhadap yang lain. Persoalan itu membuat saya bertanya apakah tidak ada kearifan atau falsafah hidup lokal yang bisa menjadi pegangan dalam hidup bersama dan mewujudkan

toleransi. Apakah ada batasan toleransi untuk toleran terhadap intoleran?

Saya menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari jawaban atas persoalan di atas dan mendialogkannya dengan pemikiran Richard Rorty. Saya membatasi bingkai pembahasan ini dalam ranah dialog filsafat Barat dan Timur, tidak bermaksud membandingkannya secara ketat.

Pembahasan studi ini akan saya mulai dengan memaparkan falsafah *empan papan* dalam *unen-unen* (baca: ungkapan, pepatah) hidup manusia Jawa. Selanjutnya, saya paparkan pemikiran Rorty tentang politik multikultural. Kemudian mendialogkan dua pemikiran tersebut untuk mencari batas toleransi.

EMPAN PAPAN FALSAFAH HIDUP MANUSIA JAWA

Empan artinya pas; tepat benar dan *papan* artinya tempat, lokasi atau area. *Empan papan* secara luas dimengerti orang harus mempertimbangkan lokasi, kondisi dan situasi dengan cermat. Tidak boleh asal berbicara juga bertindak.¹ Pemahaman tentang *empen papan* merujuk pada kesadaran 'ku' dan keberadaan 'ku', yang serta merta mewujudkan dalam cara ada 'ku'. "*Kesadaran 'Aku' merupakan asal-usul pengetahuan manusia.*"² Manusia Jawa menempatkan pengetahuan dalam cara beradanya dalam ungkapan *ngelmu kanthi laku* (berilmu dengan berbuat-ada dalam perbuatan, dan kata-kata yang disadari). Berguru dari Profesor Armada:

"Fichte adalah salah satu dari filsuf yang memandang bahwa refleksi tentang "Aku" identik dengan "tindakanku" (*Wissenschaftslehre nova methodo, 1796*). Kesadaran tentang "Aku" adalah kesadaran tentang keberadaanku, tindakanku. Dalam Bahasa Latin, "*Agere*" (bertindak) sam dengan "*Esse*" (mengada)."³

Namun, saya tidak bermaksud mempertemukan falsafah *empen papan* dengan pemikiran Fichte dalam tulisan ini.

Empen papan dalam hidup manusia Jawa merupakan cetusan *samadya*. *Samadya* berarti hidup dalam ukuran cukup, secukupnya, namun tidak berarti pas-pasan. Menurut Prof. Dr. Suwardi Endraswara, *madya* dimengerti demikian,

"Kata *madya* (tengah), agaknya tidak lahir dari konsep budaya Jawa yang sering menyebut bahwa hidup ada *purwa, madya, wusana*(ada awal, tengah, akhir). Bukan pula lahir atas dasar pembagian unggah

unggah basa, yang membagi tingkatan *krama, madya, dan ngoko*. Falsafah hidup *madya*, kemungkinan besar lahir dari konsep filosofi pewayangan Jawa, yakni dari siklus Pandawa. Dalam kerabat Pandawa ada yang disebut *pamadyaning pandhawa*, yakni Arjuna. Satria ini berada di tengah-tengah. Ia lambang kesaktian, karena bisa menguasai banyak wanita. Baginya, wanita adalah simbol kesaktian, karena itu Arjuna sering disebut *lelalanging jagad*."⁴

Dengan demikian, menjadi lebih mudah dipahami bahwa manusia Jawa memilih hidup di tengah-tengah. Sikap memilih di tengah-tengah ini juga menunjukkan disposisi anti konflik, atau manusia Jawa tidak menyukai ketidakharmonisan.

Saya hendak mendialogkan falsafah *empen papan* manusia Jawa dengan Richard Rorty yang mempertanyakan batas-batas toleransi yang bisa dibangun dalam kehidupan multikultural.

Ngono Ya Ngono Ning Aja Ngono

Artinya 'begitu ya begitu tepai jangan begitu'. Manusia Jawa berusaha bertindak dengan 'pas' (tepat), tidak berlebihan, namun juga tidak ekstrem sebaliknya. T tutur kata, sikap dan tindakan itu didasarkan pada ukuran umum atau etika yang sudah disepakati, bertindak secara wajar. Etika yang terbangun dari perasaan (hati) dan budi (kesadaran), sehingga menjadikan manusia Jawa yang *humanis* dalam pergaulan. Dengan kata lain, manusia Jawa memerhatikan ilmu jiwa Jawa, yakni ilmu jiwa sosial.

Falsafah *madya* ini memampukan manusia Jawa menjadi adaptif, yang mewujudkan dalam falsafah *empen papan*. Hal senada dapat ditemukan dalam ungkapan-ungkapan kebijaksanaan lain,

¹ St. S. Tartono, *Pitutur Adi Luhur*, Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2009, hal. 187

² Armada Riyanto, CM, "Relasionalitas Filsafat Pondasi Interpretasi: *Aku, Teks, Layan, Fenomen*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, hal.189

³ *Ibid.*, hal.190

⁴ Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum., *Falsafah Hidup Jawa*, Jakarta: Cakrawala,2016, hal. 49

yakni:⁵ *pertama, sing bisa angon mangsa* (yang bisa menggembalakan (kemampuan menggembala) waktu/ situasi). Manusia Jawa hendaklah dalam *sesrawungan* (pergaulan; perjumpaan/ hubungan sosial) bisa menempatkan ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang dimaksud adalah situasi dan kondisi orang lain. Sikap dan tindakan itu diambil karena situasi orang lain tidak kita ketahui secara pasti, tentang yang sedang dia pikirkan, alami, atau harapkan. Dengan demikian pembicaraan dan cara berbicara pun sungguh harus diatur. Tidak bisa asal berbicara atau bertindak. *Kedua, seje kulit seje anggit* (setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Ungkapan itu sepemahaman dengan *seje uwong seje omong* (setiap orang mempunyai perbedaan tentang yang dikatakan dan yang dipikirkan). Sikap hidup ini menuntun manusia Jawa menghargai orang lain. Kemampuan itu merupakan satu sikap bijaksana. Kebijaksanaan yang mewujud dalam tindakan tidak melukai hati dan perasaan orang lain.

Sikap memperhitungkan apa yang mungkin dirasakan dan dipikirkan orang lain, menjadikan manusia Jawa *anoraga* (merendahkan diri), yang kemudian pada tahap selanjutnya jika menjadi *habitus* akan berbuah *andhap asor* (rendah hati). Manusia Jawa dilatih agar memiliki sikap demikian dengan beberapa rumusan negasi, misalnya: 1) *sapa sira sapa ingsun, aja adigang adigung adiguna, dan aja dumeh* (janganlah mengunggulkan diri, merendahkan orang lain, menghina orang tidak punya); 2) *aja mung golek wah* (jangan gila pujian, hiduplah sederhana); 3) *sebaiknya gong lumaku tinabuh* (janganlah mengobrol kepandaian); 4) *golek menange dhewe* (jangan mencari kemenangan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain).⁶

Dengan demikian ukuran sikap dan tindakan “*ngono*” mengandaikan kesadaran yang mendalam terkait dengan konteks saat itu. Ukurannya tidak bisa digunakan untuk peristiwa, ruang, waktu, dan subyek lain yang berbeda.

Melok Nanging Aja Nyolok

Falsafah madya yang kedua ini berarti tampak jelas, tetapi jangan terlalu mencolok. Cara membaca *melok*, ‘me’ seperti *meres* (memeras), dan bukan ‘me’ dalam *menggok* (berbelok). Meskipun dibunyikan dengan cara kedua juga bisa dipahami sebagai arti yang positif, namun konteks kata *melok* dimengerti dengan pengucapan cara yang pertama. *Melok* (tampak) dimengerti sebagai tampak secara wajar, sedangkan *nyolok* (terlalu tampak) dimengerti sebagai tampak secara berlebihan. Penampakkan manusia Jawa sebagai ‘aku’ tidak supaya mendapatkan pengakuan sebagai orang yang mempunyai kelebihan. Penilaian sebagai ‘orang yang mempunyai kelebihan’ adalah hak subyek lain. Hal itu tidak pernah menjadi motivasi manusia Jawa yang menghayati ‘*melok*’ tadi.

Sebagai contoh: Presiden Jokowi memenuhi kriteria ini. Beliau tidak menggembar-gemborkan prestasi dan kemampuannya kepada masyarakat Indonesia. Media, pengamat dan masyarakat yang memberikan penilaian atas kemampuan itu. Jokowi menampakkan diri sebagai pribadi yang sederhana, secara wajar, melakukan tugasnya. Dalam konteks ini *nyolok* bisa dimengerti sebagai arogan. Sikap yang mewujud dalam bentuk konferensi pers yang memberi janji-janji besar dan *wah*. Jokowi juga tidak menonjol-nonjolkan dirinya sebagai orang yang telah meraih banyak kesuksesan dalam perannya sebagai presiden. Namun semua warga negara tahu betapa besar jasa dan kemajuan yang telah dirintisnya.

⁵ Bdk. *Ibid.* hal. 50

⁶ *Ibid.* hal. 51

Singkatnya, Jokowi tidak mengatakan dirinya besar, tetapi subyek lain yang memberi apresiasi bahwa Jokowi besar, luar biasa, hebat, dan seterusnya.

Kesadaran akan keberadaanku membuat orang menjadi cukup jelas memandang dirinya sendiri, bahkan sekalipun tanpa pengakuan orang lain. Kesadaran manusia Jawa ini juga mengalir dari sikap bijaksana yang lain, yakni *sak nduwure langit sih ana langit* (di atas langit masih ada langit). Seandainya aku kaya, masih ada yang lebih kaya; seandainya aku pandai, masih ada yang lebih pandai; bahkan seandainya aku bijak, masih ada yang lebih bijak. Tindakan menonjolkan diri dengan demikian tidak mewakili kesadaran yang penuh akan dirinya sendiri. Dalam hal ini bisa dilihat *kedalaman* pemaknaan akan kedirian manusia Jawa. Hal itu menempatkan manusia dalam bingkai falsafah *empan papan* manusia Jawa.

Bener Ning Ora Pener

Falsafah madya yang ketiga berarti benar tetapi tidak tepat (tidak cocok, tidak sesuai, tidak relevan, tidak *applicable*). Falsafah ini lebih mudah dipahami dalam konteks penerapannya. Saya maksudkan, sebuah kebenaran belum tentu tepat jika diungkapkan dengan cara yang tidak tepat. Misalnya, kebenaran bahwa seseorang mempunyai kelemahan moral tertentu, namun mengkritiknya langsung di depan orang banyak, pasti bukanlah cara yang tepat atau *ora pener*. Meskipun memang benar adanya bahwa orang itu memiliki kelemahan moral, yang juga diketahui oleh kebanyakan orang.

Kebenaran yang diyakini seseorang juga tidak serta merta menjadi kebenaran bagi banyak orang. Misal, kebenaran yang diusung kelompok yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia, tentu tidak tepat. Manusia Jawa memiliki kesadaran akan perbedaan dalam keragaman yang begitu

kuat. Kesadaran yang demikian juga menghantar manusia Jawa menjadi pribadi yang toleran. Hal itu teruji dalam sejarah bahwa manusia Jawa mempunyai kemampuan beradaptasi dengan berbagai agama yang masuk ke tanah Jawa. Namun demikian tidak berarti manusia Jawa akhirnya diam dan tidak mengungkapkan kebenaran. Sebaliknya, manusia Jawa berusaha menemukan cara yang paling tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan cara itu akhirnya kebenaran bisa diterima oleh yang tidak benar. Dengan demikian tujuan menyampaikan kebenaran terwujud karena dilakukan dengan cara yang tepat atau sesuai.

Kebenaran diungkap dalam ruang kebersamaan. Manusia Jawa mengedepankan harmoni hidup bersama. Pengungkapan kebenaran yang menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan akan dihindari. Dengan kata lain kebenaran yang belum menemukan cara pengungkapan yang tepat akan dibiarkan menjadi kebenaran yang tinggal dalam aku. Demikian falsafah ini menegaskan disposisi manusia Jawa dalam menghayati *empan papan*.

Sing Bisa Prihatin Sajroning Bungah, Sing Bisa Bungah Sajroning Prihatin

Falsafah keempat berarti yang bisa prihatin (tahu batas, mengendalikan diri) di dalam kegembiraan, yang bisa bergembira di dalam kesusahan (penderitaan). Bingkai *empan papan* menjadikan manusia Jawa senantiasa menempatkan diri tidak larut dalam suasana sementara. Hidup seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di atas. Karena sikap yang tepat adalah berusaha menempatkan batin ada di poros yaitu di tengah. Situasi yang sekarang terjadi pasti akan mengalami perubahan, tidak akan sama sekali tetap selamanya.

Falsafah ini menuntun manusia Jawa agar tidak bersikap berlebihan, bisa mengekang hawa nafsu jika sedang hidup

enak. Sebaliknya tidak terlalu sedih jika sedang dalam kekurangan. Seolah hidup enak atau kekurangan hanya bungkus saja, yang menjadi isi adalah sikap batin, atau laku yang ada di dalamnya. *Prihatin* dalam frase pertama merupakan disposisi 'laku'. Laku dimengerti sebagai penghayatan, *mengada* manusia Jawa. Misalnya, meskipun mempunyai harta berlimpah, hidup tidak harus dijalani dengan huru-hura atau berfoya-foya. Demikian sebaliknya, *bungah* dalam frase yang kedua juga merupakan laku. *Bungah* tidak dimaksudkan sebagai kegembiraan (hidup enak), namun kemampuan menjadi tenang (tidak menyalahkan pihak lain, apalagi Sang Ilahi) dan mengambil hikmah dari situasi yang terjadi. Ini bukan sekedar teoretis, karena bagi manusia Jawa *ngelmu iku kudu kanthi laku* (menjadi berilmu atau bijak itu harus dengan berbuat, menghayatinya dalam hidup keseharian).

Laku mengekang hawa nafsu (tahu batas) menumbuhkan sikap tidak *ngaya* (memaksa diri) dalam mengejar hal-hal duniawi (khususnya prestis dan harta benda). Sikap *ngaya* bisa mendorong manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diharapkan. *Laku* justru membuat manusia Jawa hidup lebih tenang, tenteram jiwanya dan mengalami keseimbangan serta harmoni. Ada banyak manusia yang hidupnya kaya raya namun tidak tenang, karena *ngaya*. Sebaliknya ada banyak orang tidak tenang dalam segala kekurangannya karena tidak menghayatinya dengan *laku*, namun lebih disibukkan dengan berbagai cara untuk menaklukan situasi yang dialaminya. Manusia yang menjalani hidup tidak dengan *laku* nampak dalam sikap hidup yang selalu mengeluh, menuntut, bahkan memaksa subyek lain untuk mengerti dirinya.

Ada ungkapan lain yang senada yakni: *yen krasa enak uwisana, yen krasa ora enak terusana*. Suwardi Endraswara menuliskan, demikian:

“...ungkapan ini mengandung ajaran nasihat agar di dalam hidup bermasyarakat, orang senantiasa dapat menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Ambisi boleh, tetapi jangan ambisius. Kedudukan mestinya sebuah amanat, jangan diminta. Kedudukan jangan disalahgunakan. Sebaliknya, jika tidak memiliki kedudukan, sengsara, tidak perlu kecil hati. Dengan falsafah madya serupa mengarahkan manusia Jawa agar bersikap dan bertindak tidak *aji mumpung*, jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Seperti halnya orang sedang makan gula, lalu lupa dengan kemanisan, manusia akan lengah.”⁷

Kemampuan mengendalikan diri (hawa nafsu) sangat penting bagi manusia Jawa. Falsafah ini menegaskan pentingnya bingkai *empan papan* bagi manusia Jawa.

Aja Bungah ing Pengalem, Aja Susah ing Panacad

Artinya jangan merasa (terlalu) bangga jika dipuji, jangan (terlalu) susah jika mendapat celaan (= *aja mongkog ing pambombong, aja kendho ing panyendhu*). Manusia Jawa diharapkan bisa mawas diri. Mawas diri berarti mengambil posisi di tengah, dalam menghadapi pujian atau celaan, dengan mempertimbangkan setiap perkara dengan bijaksana. Karena, perlu diingat bahwa *wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang panacad*. Artinya, jika seseorang senang dengan kita, ada banyak cara untuk memuji dan membuat kita senang kepadanya, demikian juga sebaliknya. Manusia Jawa membutuhkan keseimbangan emosional dalam bersikap, berkata dan berperilaku dalam membuat keputusan menghadapi pujian ataupun celaan.

Bertahan dalam kesadaran dan mengendalikan diri adalah kemampuan manusia Jawa untuk tahu batasannya,

⁷ Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum., *Falsafah Hidup Jawa*, Jakarta: Cakrawala, 2016, hal. 52

empnan papan. Kebijakan tergantung dari kemampuan manusia Jawa untuk tidak mudah tergoda dari sekedar pandangan yang datang dari luar dirinya. Falsafah ini mengantarkan manusia Jawa tidak mudah sombong terhadap pencapaian diri dan sebaliknya, tidak mudah kehilangan pegangan tatkala mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya.

Tega Larane Ora Tega Patine

Artinya tega melihat orang lain menderita, namun tidak akan membiarkannya mati. *Unen-unen* ini biasanya diterapkan dalam kehidupan keluarga. Kalau ada anggota keluarga sakit, maka anggota lain akan merasakan sakit juga. *Unen-unen* lebih terasa dalam konteks pendidikan dalam keluarga. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, apalagi membuat nama keluarga menjadi buruk, maka orangtua akan menghukum. Hukuman yang diberikan tentu dalam ukuran kewajaran, sesuai dengan kesalahan karena *tega larane*. Namun hukuman itu tidak akan diberikan sampai tingkat kematian. Bahkan jika sangat besar sekalipun kesalahan anggota keluarga, kematian tidak akan pernah menjadi penyelesaian masalah. Dalam pendidikan manusia Jawa ada *unen-unen: diculke sirahe digondheli buntute* (dilepaskan kepalanya, dipegangi ekornya). Dalam pendidikan manusia Jawa, seseorang diberi kesempatan menemukan yang terbaik untuk dirinya. Tugas orangtua tetap mendampingi dan mengarahkan. Dengan kata lain tidak dilepaskan sama sekali sebebas-bebasnya.

Manusia Jawa dalam *laku nya* selain harus teguh dalam kesadaran akan dirinya sendiri, juga terbiasa bersikap wajar dan dalam batasan tertentu terhadap orang lain. Salah satu kemampuan manusia Jawa dalam membentuk diri sebagai pribadi yang toleran. Ada batasan-batasan

kewajaran yang disadari manusia Jawa dalam bertindak terhadap orang lain.

Sawang Sinawang

Artinya saling memandang, saling dipandang. Apa yang kelihatan tidak selalu yang nampaknya. Sikap iri atau *melik* terhadap manusia lain, entah itu fisik, materi, status, tidak tepat. Kehidupan manusia lain belum tentu seperti nampaknya. Yang sungguh meyakinkan adalah apa yang kuhidupi, yakni diriku dengan segala yang melekat di diri. Sebaliknya orang lain pun memosisikan diri sama seperti ketika aku memandang orang lain. Kebahagiaan tidak dapat diukur dari *penampakkan* yang kelihatan oleh mata. Kebahagiaan adalah soal *rasa*, karenanya tumbuh di dalam (hanya si pelaku yang mengetahuinya). Karena itu iri terhadap *penampakkan* orang lain adalah sikap batin yang keliru.⁸

Falsafah ini juga menuntun manusia Jawa untuk senantiasa bersyukur atas apa yang dialaminya, dimensi religius manusia Jawa. Setiap manusia mempunyai jalan *laku nya* sendiri-sendiri dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Sikap menerima diri sebagai pemberian Yang Ilahi juga dihayati dalam *unen-unen* lain yakni: *narima ing pandum* (menerima dengan rela pembagian – kehidupan yang dipahami sebagai dari Yang Ilahi). Dengan demikian kebahagiaan itu bukan sebuah situasi, melainkan suatu aktivitas atau penghayatan yang dialami dan dihayati sebagai *laku* (senada dengan Aristoteles dalam *Nichomacean Ethics*, kebahagiaan bukan suatu situasi yang dikejar, tetapi aktivitas berbahagia). Dengan demikian, miskin-kaya, pejabat-rakyat biasa, tampan/cantik-biasa-biasa saja, bukanlah ukuran kebahagiaan dalam falsafah *sawang sinawang*.

⁸ Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum., *Berpikir Positif Manusia Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2014, hal. 291-292

Pemikiran Richard Rorty⁹

Manusia Ironis. Orang yang menyadari bahwa pandangan dunia, kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinannya yang paling mendalam pun bersifat kebetulan, itulah yang oleh Rorty disebut *manusia ironis*. Ia “berani menerima kenyataan bahwa kepercayaan dan keinginannya yang paling sentral [pun] tidak mempunyai kepastian” [CIS XV].¹⁰

Manusia ironis bersikap ironis terhadap pandangannya sendiri dan sadar bahwa kosa kata akhir yang dipakainya dapat saja berubah. Tentu, kosa kata akhir tidak berubah seenaknya karena, justru sebagai kosa kata *akhir*, menjadi wahana keyakinan paling mendalam, bahkan identitasnya sendiri. Kosa kata akhir tidak berubah karena terbukti kurang benar: Soalnya, kosa kata itu bukan benar atau salah, melainkan tepat atau kurang tepat dalam bersama-sama mengatasi tantangan kehidupan. Tetapi kosa kata akhir dapat bergeser, bahkan berubah karena orang bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki kosa kata akhir lain.

Manusia ironis itu bukan berarti ia tidak dapat sungguh-sungguh meyakini sesuatu, skeptis total, dan bukanlah orang tanpa keyakinan. Melainkan di sini Rorty ingin menegaskan bahwa manusia ironis adalah orang yang dapat meyakini sesuatu namun tidak harus fanatik dan eksklusif (bersedia mengakui bahwa orang lain bisa saja mempunyai pandangan dan keyakinan yang berlainan, yang tidak mesti “kurang benar”). Menurutinya tidak mungkin kita bertanya, mana dari pandangan dan keyakinan-keyakinan itu yang paling benar.

Manusia Liberal Yang Ironis.

Pada umumnya “liberal” berarti menganggap kebebasan sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bersama manusia. Masyarakat liberal tidak memaksakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan tertentu pada masyarakat. Dalam masyarakat liberal orang dapat menyatakan pendapatnya tanpa harus takut. Yang menentukan di sini adalah kemampuan kita untuk berbicara dengan orang lain tentang hal-hal yang dianggap benar, bukan yang memang benar.

Apakah manusia ironis dapat bersikap liberal, bukankah manusia ironis sadar bahwa kosa kata akhir mana pun dapat dideskripsikan kembali (berubah), padahal tidak ada orang yang suka kalau kosa kata akhirnya – wahana keyakinan-keyakinan paling mendalam miliknya – dideskripsikan kembali?

Rorty menangkis serangan ini dengan membedakan antara wilayah privat dan wilayah publik. Ironisme berlaku dalam wilayah privat, artinya terhadap pandangan dan keyakinan-keyakinannya sendiri. Tetapi justru karena ia sadar akan kerelatifan kosa kata akhir miliknya sendiri, ia bersedia menghormati kosa kata akhir orang lain. Ia bahkan membuka diri terhadap sentuhan kosa kata akhir lain, jadi ada kemungkinan bahwa ia akan mengubah kosa kata akhirnya sendiri.

Versi Liberal dan Komunitarian Politik Multikultural. Versi liberal politik multikultural tidak cukup memadai untuk membangun landasan batas toleransi, karena meletakkan individu secara independen dan bebas menentukan dirinya lepas dari konteks adanya (budaya). Versi komunitarian lebih bisa digunakan karena individu memang subjek yang penting untuk diakui dan dilindungi secara hukum, bentuk politik multikultural yang lebih memadai adalah politik komunitarian-demokratis yang mengakui kelompok budaya atau masyarakat sebagai subyek

⁹ Diringkas Magnis-Suseno, Franz, “Richard Rorty: Manusia Ironis Liberal” dlm: *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Jogjakarta: Kanisius, 2000, hal. 239-259.

¹⁰ Buku ketiga Richard Rorty, “*Contingency, Irony and Solidarity*”, yang diterbitkan pada tahun 1989

hukum dan moral. Dalam versi politik multikultural ini individu diakui sebagai budaya tertanam. Bentuk politik multikultural komunitarian ini tidak hanya mengakui kesetaraan hukum atau moral per orang tetapi juga hak masyarakat untuk berbeda dalam menonjolkan identitas budaya mereka.

Menciptakan Solidaritas.

”Solidaritas tidak ditemukan melalui refleksi, melainkan diciptakan. Solidaritas diciptakan dengan meningkatkan kepekaan kita terhadap segi-segi rasa sakit dan keterhinaan orang lain, orang yang belum kita kenal, secara terinci. Kepekaan lebih tinggi berarti menjadi lebih sulit untuk memarginalisasikan orang-orang yang berpikir berbeda dari kita” [CIS XVI].

Kita menjadi peka karena *bersentuhan* dengan hidup orang lain. Maka untuk membangun solidaritas nyata di antara manusia, melampaui batas-batas

”orang kita”, tidak perlu, dan tidak berguna, mengajarkan prinsip atau teori-teori tinggi tentang manusia dan Tuhan. Yang perlu adalah agar kita belajar ”ikut merasakan”. Karena itu, Rorty berpendapat bahwa filsafat, seni berakal teoretis, tidak banyak berguna dalam membangun solidaritas. Ia lebih mengharapkan peran para penyair, penulis novel, etnograf, dan wartawan [CIS 94].

TEMUAN-TEMUAN

Falsafah *empan papan* manusia Jawa menurut saya bisa membangun konsensus batas toleransi dalam konteks budaya dan tradisi mereka sendiri. Cita-cita sosial *empan papan* tampaknya cocok sebagai kerangka refleksi Indonesia tentang batas toleransi. Penekanan pada pendekatan pragmatis dan non-ideologis untuk membangun komunitas berdasarkan kerja sama, timbal balik, dan kesukarelaan tampaknya menjadi alternatif yang menjanjikan bagi ideologi liberalisme dan

komunitarianisme. Gagasan pragmatis dan non-ideologis dari *empan papan* tampaknya lebih sesuai dengan penolakan filsuf Richard Rorty terhadap pembenaran metafisik apa pun pada batas toleransi. Bagi Rorty, pembenaran metafisis melibatkan kemutlakan obyektif, ahistoris, dan universal seperti ajaran agama Kristen, hak asasi manusia, atau dialektika sejarah.

Pandangan Rorty tentang batas toleransi yang didasarkan pada gagasan ironis liberal (*the liberal ironist*) menemui kesulitan. Lebih memadai memakai pandangan ideologi komunitarian politik multikultural. Hal itu nampak dalam penghayatan manusia Jawa dalam falsafah yang mewujud dalam *unen-unen: Ngonoya ngono ning aja ngono*, artinya manusia Jawa bisa sekaligus ironis terhadap dirinya dan menerima keberadaan orang lain. Penerimaan itu mengandaikan sikap yang bebas mencoba memahami disposisi orang lain. *Unen-unen* yang lain adalah *sawang sinawang*, sikap tidak menghakimi manusia lain. Karena apa yang kelihatan belum tentu mewakili keseluruhan keberadaan dari manusia lain. Manusia Jawa menghormati independensi setiap individu namun sekaligus meletakkannya dalam ruang publik. Manusia Jawa tidak pernah menempatkan kesadaran dirinya secara sendirian, selalu dalam keberadaannya bersama dengan subyek yang lain.

Batas toleransi harus dilembagakan melalui konsensus opini publik yang dibangun secara dialogis. Hal itu sangat mungkin dilakukan karena manusia Jawa mempunyai sifat adaptif dengan *empan papan*. Membangun kesadaran diri dengan bercermin pada diri dan orang lain. Pengendalian diri manusia Jawa membawanya mampu menghargai pilihan orang lain. Dalam konteks itu, saya melihat bahwa ada dua bentuk ekspresi absolutisme / sektarianisme yang perlu diteliti lebih lanjut. Pertama-tama, sifat keyakinan absolut-sektarian. *Empan papan*

tidak mungkin mengesampingkan kesadaran manusia lain, keyakinan akan diri membuatnya tetap mampu menghargai otonomi orang lain dengan falsafah *sawang sinawang*. Keyakinan ini, apakah individu atau kolektif, tidak menjadi masalah ketika mereka berada dalam lingkup pribadi.

Keyakinan *empan papan* manusia Jawa tentunya berbeda dengan keyakinan ideologis agama-agama. Keyakinan ideologis agama-agama jatuh pada aturan-aturan kolektif/publik yang begitu mengikat. Masalah muncul ketika keyakinan secara kolektif diatur dan dipromosikan di ruang publik. Falsafah *empan papan* teruji dalam sejarah dengan adanya proses dialog antara kejawaan dengan agama-agama atau budaya yang masuk ke Jawa.

Rorty berpendapat bahwa manusia menjadi peka karena *bersentuhan* dengan hidup orang lain. *Ngelmu* manusia Jawa didapatkan dengan *laku*. Kesadaran manusia Jawa akan dirinya tidak pernah bisa dipisahkan dari hasil *sesrawungan* dengan manusia lain. Karena ilmu Jawa tumbuh dari *niteni* atas peristiwa dan fenomena diri dan sesamanya. Rorty berpendapat bahwa filsafat, seni berakal teoretis, tidak banyak berguna dalam membangun solidaritas. Ia lebih mengharapkan peran para penyair, penulis novel, etnograf, dan wartawan [CIS 94]. Dengan demikian meneguhkan pendapat Rorty, *lelaku* manusia Jawa bisa menjadi pijakan membangun filsafat etis dalam kehidupan bersama.

Manusia Jawa tidak mudah menghakimi sesama, namun tidak berarti tidak peduli dengan sesama. *Unen-unen: diculne sirahe, digondheli buntute* hendak menunjukkan dalam kehidupan bersama ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Manusia Jawa sangat menghormati aturan hidup bersama. Aturan itu tidak sekaligus sama sekali mengekang kebebasan manusia Jawa.

Falsafah di atas sangat nampak dalam kehidupan keluarga (*paseduluran*). *Paseduluran* bisa dimengerti dengan lebih luas sebagai sesama *titah* (ciptaan). Dengan demikian jika manusia menghayati peduli terhadap sesama tanpa menghakimi; sekaligus memberi kebebasan tanpa membiarkannya sendirian. Maka batasan toleransi manusia ironis liberal Rorty akan menumbuhkan kehidupan bersama yang luar biasa bukan dalam hal teori, tetapi dalam hidup etis-konkret.

Dengan menghayati falsafah *empan papan*, upaya mengembangkan masyarakat yang plural dan toleran bisa terwujud. Kita dapat melihat bahwa politik multikultural tunduk pada dua potensi kesulitan yang mengancam keberhasilan proyek multikultural. Magnis Suseno tentang pemikiran Rorty menuliskan,

“Yang pertama adalah bahwa politik politik multikultural gagal mengenali komunitas budaya sebagai subjek hukum dan moral. Perlindungan hukum bagi individu tidak menghalangi penyerangan terhadap minoritas karena masalah ini bukan individu tetapi hak kelompok. Perbedaan kelompok bukan hasil dari pilihan individu. Mereka adalah perbedaan yang tertanam secara kultural. Kita tidak dapat melindungi hak kelompok hanya dengan perlindungan individu. multikultural tunduk pada titik-titik buta yang melekat dalam ideologi liberal dan komunitarian. Versi liberal Kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah di Indonesia, misalnya, tidak dapat diselesaikan dengan mengurangi masalah menjadi hak-hak individu. Persoalannya adalah pelanggaran terhadap hak kelompok untuk mempraktikkan keyakinannya sendiri yang tertanam secara kultural.”¹¹

Jika manusia *sawang sinawang* dan menjalankan *bener rung mesthi pener* maka tidak ada kelompok atau individu

¹¹ Magnis-Suseno, Franz, “Richard Rorty: Manusia Ironis Liberal” dlm: *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Jogjakarta: Kanisius, 2000, hal. 258.

yang boleh karena kebebasannya menghakimi bahkan menindas pihak yang lain.

“Sebagaimana telah kita lihat, bentuk-bentuk komunitarian politik multikultural yang mengakui kelompok budaya atau masyarakat sebagai subyek hukum dan moral, bagaimanapun, tunduk pada ekstremisme politik identitas yang, sering kali, mendorong bentuk-bentuk tradisional kekerasan terhadap budaya lain. Penekanan pada hak kelompok dan identitas kelompok, didorong oleh politik multikultural komunitarian, dapat digunakan oleh kelompok-kelompok sektarian atau fundamentalis untuk memperkuat identitas intoleran mereka. Suatu komunitas yang tertutup dan sektarian akan membahayakan koeksistensi sosial karena intoleransi terhadap Yang Lain.”¹²

Dengan *empan papan* manusia Jawa dibimbing tidak untuk menonjolkan diri atau kelompoknya, karena penilaian diri berdasarkan kesadaran keberadaannya secara subyektif di hadapan sesama.

“Yang kedua adalah kegagalan untuk secara jelas mengartikulasikan batas toleransi melalui konsensus yang disusun secara diskursif pada batas toleransi. Kami gagal untuk merumuskan batas toleransi secara diskursif seperti dalam keadaan apa kita tidak boleh mentoleransi intoleransi. Kita tidak dapat mengatakan apa pun tentang perilaku intoleran terhadap minoritas karena tidak ada bentuk toleransi yang diskursif dan batas-batasnya. Keyakinan yang tidak toleran dari sebuah komunitas yang mempromosikan kekerasan terhadap yang lain dapat dilindungi dan dipertahankan dengan mengacu pada gagasan toleransi. Akibatnya, tidak ada konsensus di Indonesia yang dapat digunakan untuk mengutuk kekerasan terhadap komunitas seperti Ahmadiyah. Setiap dialog yang mampu membangun konsensus umum tentang batas toleransi di Indonesia harus diinformasikan oleh kerangka nilai bersama yang telah muncul

dalam budaya dan sejarah Indonesia dan menikmati rasa hormat yang berkelanjutan di berbagai komunitas Indonesia. Cita-cita sosial Indonesia tentang gotong rotong tampaknya cocok untuk kerangka nilai-nilai bersama.”¹³

Memang falsafah Jawa biasanya diajarkan secara personal. Karena itu dalam konsepsi umum yang melahirkan hukum tidak secara jelas bisa digambarkan atau ditunjukkan.

Falsafah *empan papan* menjadikan manusia adaptif terhadap situasi dan kondisi baru. Rorty juga mengingatkan kita bahwa penolakan untuk mengenali kontingensi dalam sistem kepercayaan kita, sementara mendukung absolutisme historis, dapat melahirkan kekerasan dan ketidakadilan. Politik multikultural harus mengambil langkah yang tegas terhadap tindakan-tindakan intoleran, baik *verbal* maupun tindakan fisik. Tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan publik harus tunduk pada penegakan hukum yang tidak memihak. Tindakan itu harus diambil dengan bijak agar tidak menjadi intoleransi baru. Diskusi juga harus memperhatikan apakah perlindungan terhadap hak budaya dapat dikorbankan ketika hak itu digunakan untuk menghancurkan koeksistensi sosial sama sekali. Meminjam ide-ide Rorty tentang batas toleransi, proyek untuk menyelamatkan multikulturalisme bisa menjadi satu dari dua cara: pertama, kultivasi konsensus politik yang mengecam kelompok sektarian yang telah terbukti berulang kali melakukan kekerasan terhadap minoritas; kedua, mengkategorikan pidato kebencian sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pada akhirnya, politik multikultural sangat penting untuk meminimalkan kekerasan dengan mempromosikan intoleransi kepada yang tak tertahankan.

Falsafah *empan papan* mewujudkan dalam *unen-unen* jika dihayati dengan baik akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang

¹² Ibid. 257

¹³ Ibid. 258

tahu batas, rendah hati, mawas diri, dan toleran terhadap manusia lain. Menjadi masalah karena kearifan itu, yang begitu dalam, sudah kurang mengakar di generasi sekarang. Globalisasi menjadi tantangan tersendiri, karena pertukaran budaya yang begitu intens, *unen-unen* itu bahkan gemanya sudah kurang terasa apalagi dalam perwujudan etisnya dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Falsafah *empan papan* menjadikan manusia adaptif terhadap situasi dan kondisi baru. Rorty juga mengingatkan kita bahwa penolakan untuk mengenali kontigensi dalam sistem kepercayaan kita, sementara mendukung absolutisme historis, dapat melahirkan kekerasan dan ketidakadilan. Politik multikultural harus mengambil langkah yang tegas terhadap tindakan-tindakan intoleran, baik *verbal* maupun tindakan fisik. Tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan publik harus tunduk pada penegakan hukum yang tidak memihak. Tindakan itu harus diambil dengan bijak agar tidak menjadi intoleransi baru. Diskusi juga harus memperhatikan apakah perlindungan terhadap hak budaya dapat dikorbankan ketika hak itu digunakan untuk menghancurkan koeksistensi sosial sama sekali. Meminjam ide-ide Rorty tentang batas toleransi, proyek untuk menyelamatkan multikulturalisme bisa menjadi satu dari dua cara: pertama, kultivasi konsensus politik yang mengecam kelompok sektarian yang telah terbukti berulang kali melakukan kekerasan terhadap minoritas; kedua, mengkategorikan pidato kebencian sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pada akhirnya, politik multikultural sangat penting untuk meminimalkan kekerasan dengan mempromosikan intoleransi kepada yang tak tertahankan.

Falsafah *empan papan* mewujudkan dalam *unen-unen* jika dihayati dengan baik

akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang tahu batas, rendah hati, mawas diri, dan toleran terhadap manusia lain. Menjadi masalah karena kearifan itu, yang begitu dalam, sudah kurang mengakar di generasi sekarang. Globalisasi menjadi tantangan tersendiri, karena pertukaran budaya yang begitu intens, *unen-unen* itu bahkan gemanya sudah kurang terasa apalagi dalam perwujudan etisnya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sri Wintala, 2018, *Etika Jawa*, Yogyakarta: Araska Publisher
- Astari, Gita Putri, Hasyim, Muhammad, Kuswarini, Prasuri. 2019. Penerjemahan Metafora Novel "Lelaki Harimau" ke dalam "L'homme Tigre". *Jurnal Ilmu Budaya*, 7 (1), 83-93.
- Endraswara, Prof. Dr. Suwardi, M.Hum., 2016, *Falsafah Hidup Jawa*, Jakarta: Cakrawala
- Endraswara, 2014, *Berpikir Positif Manusia Jawa*, Yogyakarta: Narasi.
- Hasyim, M., Prasuri Kuswarini, P., Kaharuddin. 2020. Semiotic Model for Equivalence and Non-Equivalence in Translation. *Humanities & Social Sciences Reviews*. 8 (3), 381-391.
- Kaharuddin, Hasyim, Muhammad. 2020. The Speech Act of Complaint: Socio-Cultural Competence Used by Native Speakers of English and Indonesian. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24 (06), 14016-14028
- Magnis-Suseno, Franz, 2000, "Richard Rorty: Manusia Ironis Liberal" dlm: *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Jogjakarta: Kanisius.
- Maknun, T., Hasjim, M., Muslimat, M., and Hasyim, M. 2019. The form of the traditional bamboo house in the

- Makassar culture: A cultural semiotic study. *Semiotica*. In press.
- Santosa, Iman Budhi, 2011, *Laku Prihatin*, Yogyakarta: Memayu Publishing.
- Tartono, St. S., 2009, *Pitutur Adi Luhur*, Yogyakarta: Pustaka Nusatama.
- Riyanto, Armada, CM, 2018, "Relasionalitas *Filsafat Pondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*, Yogyakarta: Kanisius.
- Teng, H. Muhammad Bahar Akkase. 2017. Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah). *Jurnal Ilmu Budaya*, 5 (1), 62-68
- Yustinus, Dr. dan Dr. Tjatur raharso (eds.), 2018, *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi, STFT Widya Sasana*, Malang: Dioma.
- <https://nikolaskristiyantosj.wordpress.com/2012/08/11/richard-rorty-manusia-ironis-liberal/> diunduh 4 November 2018.